

DINAS SOSIAL
Kabupaten Serang



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

TAHUN 2021

(0254) 200304

Jl. Raya Petir - Serang, Curug,
Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171

dinsos@serangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021.


Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Serang ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, juga merupakan pengukuran capaian kinerja yang difokuskan pada pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021.

Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Serang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun selanjutnya, dan tolak ukur target pencapaian kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Serang serta dapat lebih mensinergikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang - bidang di Dinas Sosial Kabupaten Serang demi peningkatan kesejahteraan sosial melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Serang dan juga dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Aamiin.

Serang, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG**



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.3 Sistematika Penulisan	6
1.4 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Rekomendasi	37

DAFTAR ISTILAH

Daerah	Daerah Kabupaten Serang
Pemerintah Daerah	Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Daerah
Pemerintah Daerah	Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Bupati	Bupati Serang
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
Fakir Miskin	Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan
Penyandang disabilitas	Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental
Lanjut Usia Terlantar	Seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Anak Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Anak Jalanan	Seorang anak yang berusia 5-18 tahun dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan.

Anak Disabilitas	Seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental
Anak Korban Kekerasan/Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang –ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi/jasa.
Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencharian dan tempat tinggal yang tetap serta menghambata ditempat umum.
Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
Pemulung	Orang –Orang yang melakukan pekerjaan mengais langsung dan pendaur ulang barang bekas.
Kelompok Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial seperti homo (gay), waria.

Bekas Warga Bina Lembaga Masyarakatan	Seorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
Orang dengan HIV/AIDS	Orang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan dukungan dan pengobatan yang mencapai kualitas hidup yang optimal
Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang-orang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
Korban Tindak Kekerasan	Orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di Negara tempatnya dia bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Dokumen yang memuat pertanggungjawaban OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Disamping Laporan Tahunan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing Instansi Pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya dari tahun ketahun. Melalui LAKIP Dinas Sosial Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk Tahun selanjutnya.

Agar laporan pertanggungjawaban Pemerintah lebih sistematis dan akuntabel dalam menyampaikan capaian kinerja dari setiap instansi/OPD maka ditetapkan pedoman terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

1.2.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Serang Kabupaten Serang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Serang, Dinas Sosial mempunyai Tugas Pokok Merumuskan Kebijakan Teknis, Merencanakan, Melaksanakan, Mengatur dan Menyelenggarakan Kegiatan dan Usaha Pelayanan Sosial, Pemberian Bantuan Sosial, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial Serta Pembinaan Panti-Panti Sosial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Serta Menyelenggarakan Ketatausahaan Dinas.

1.2.2. Fungsi

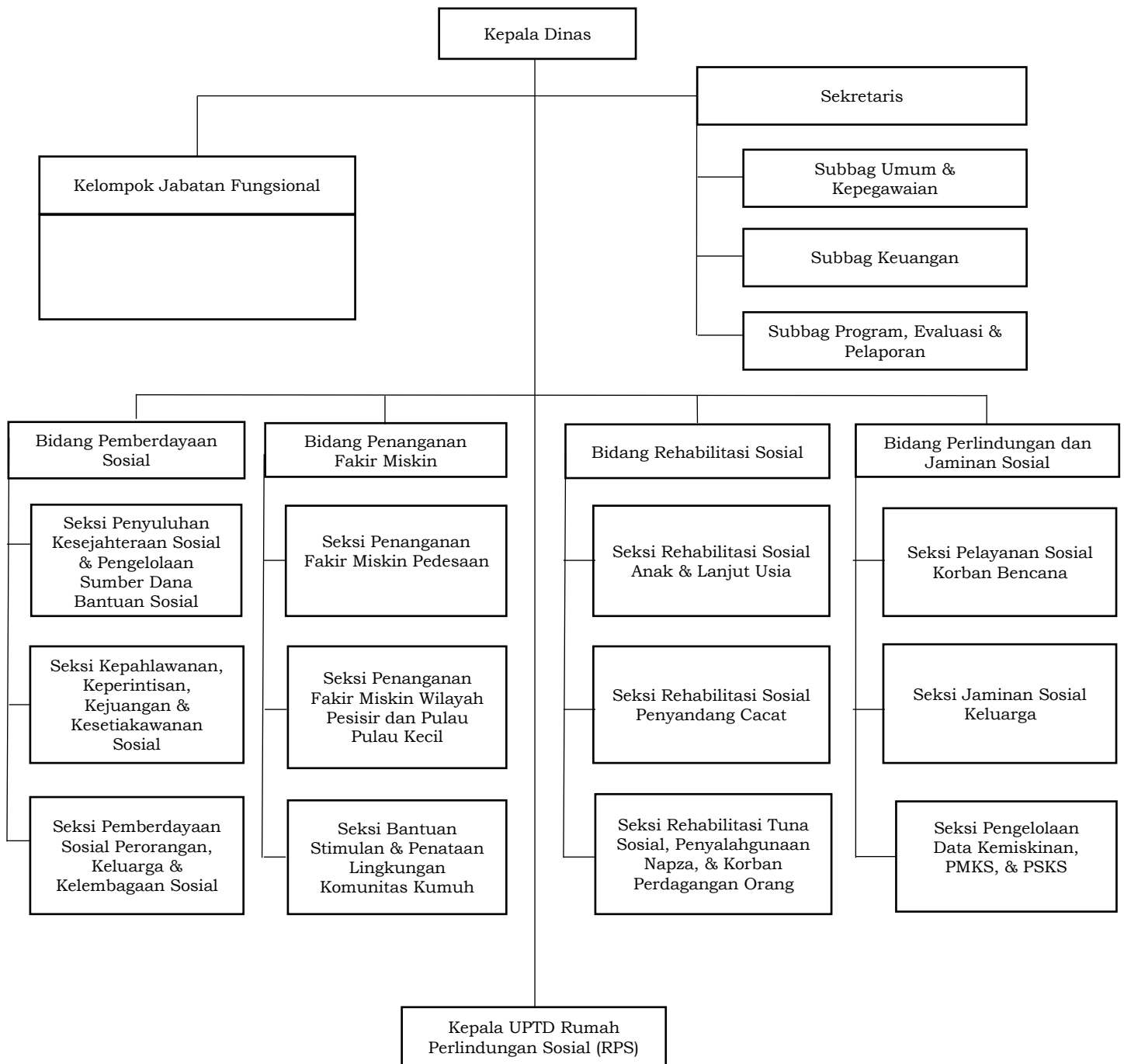
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Serang mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bina Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bina Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Pelaksanaan Perijinan dan Pelayanan Umum Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
6. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif Ketatausahaan Dinas Sosial.

1.2.3. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, seperti tergambar sebagai berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016

1.2.4. Daya Dukung

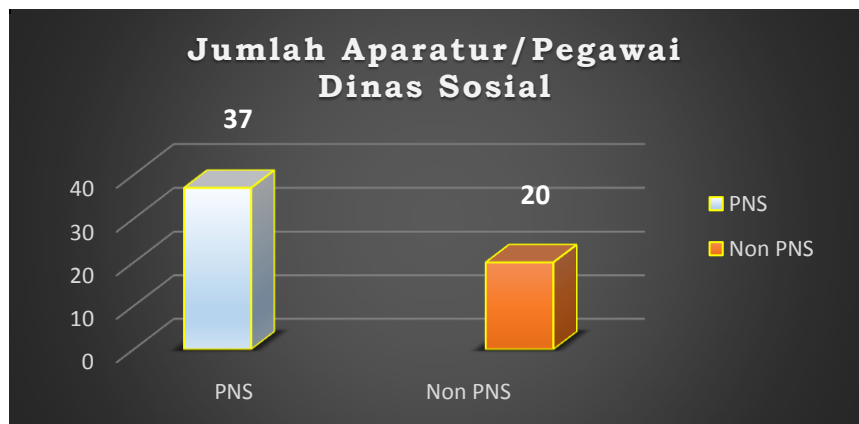
1.2.4.1. Daya Dukung Aparatur

Untuk menjalankan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Rencana Straregis Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026, di dukung oleh sejumlah aparatur/pegawai dan juga mitra kerja yang membantu dilapangan sebagai berikut:

1. Jumlah aparatur/pegawai Dinas Sosial sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini:

Gambar 2 Table Grafik

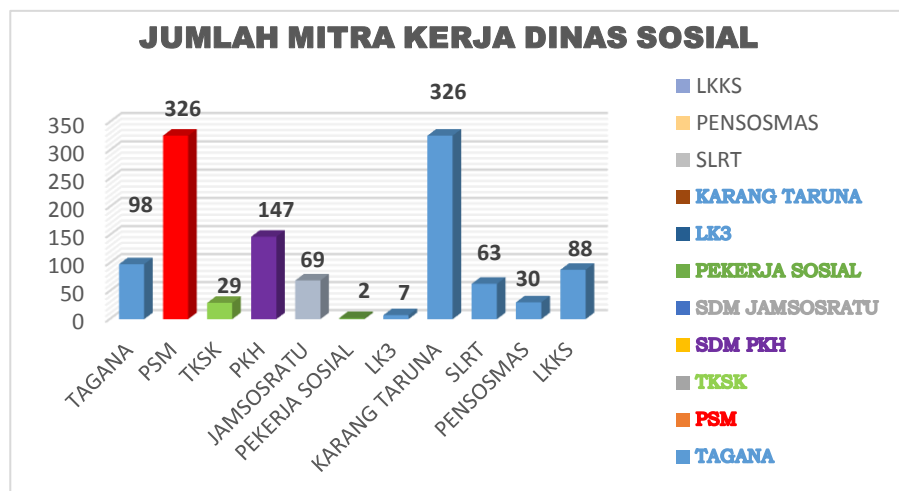
Jumlah Aparatur/Pegawai Dinas Sosial Kab. Serang



2. Mitra Kerja Dinas Sosial sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini:

Gambar 3 Table Grafik

Jumlah Mitra Kerja Dinas Sosial



1.2.4.2. Sarana dan Prasarana

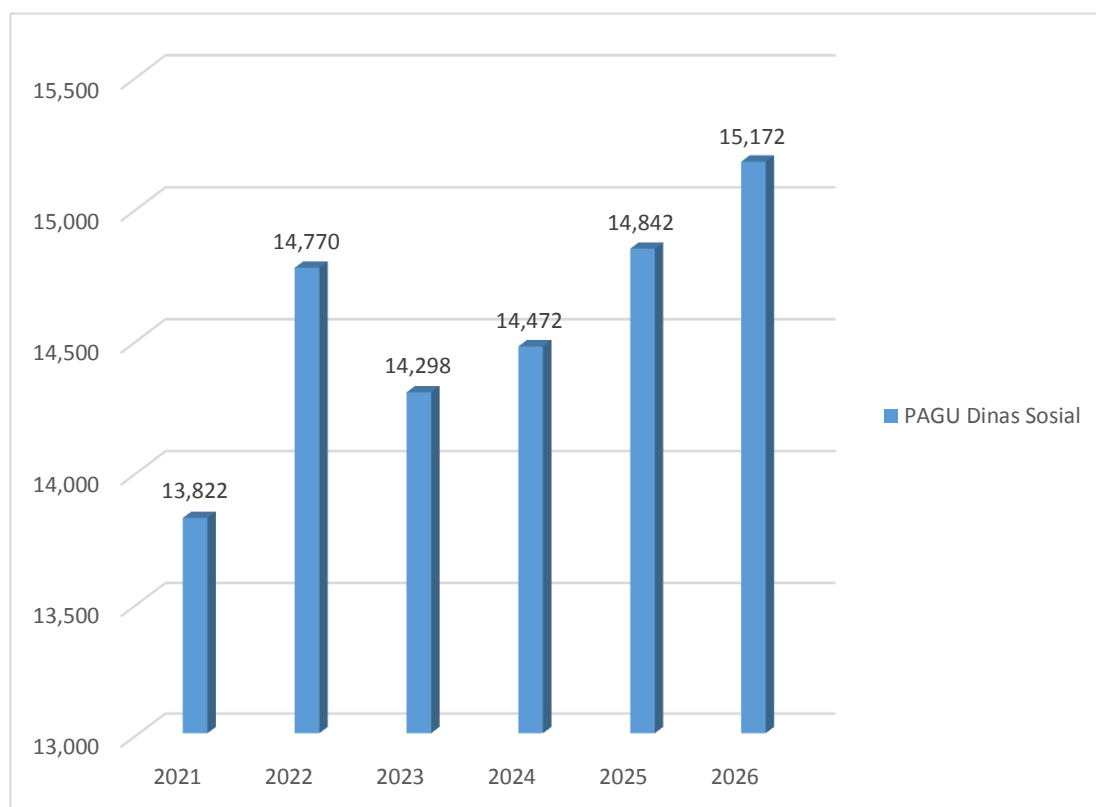
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Serang berlokasi di Jl. Raya Serang – Petir No.1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang, dan menempati tanah dengan luas 4.770 m², bangunan yang menjadi bagian dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Serang terdiri dari 1 unit bangunan kantor utama, 1 unit bangunan ruang pertemuan (aula rapat), 1 unit Rumah Perlindungan Sosial dan Loka Bina Karya (RPS-BLK), serta di dukung dengan berbagai kendaraan operasional baik kendaraan roda dua (Motor) dan kendaraan roda empat (mobil) dan sarana pendukung lainnya.

1.2.4.1. Anggaran

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Serang dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, sebagai mana tergambar dalam tabel grafik sebagai berikut:

Gambar 4 Table Grafik

Pagu Dinas Sosial dari Tahun 2021 s/d Tahun 2026 (Dalam Milyar Rupiah)



1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berikut sistematika penulisan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3 Sistematika Penulisan
- 1.4 Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Penutup

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis yang diangkat oleh Dinas Sosial berdasarkan rumusan isu strategis yang ada di RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 dalam urusan Sosial dan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS sehingga jumlah PMKS masih cukup tinggi.
2. Jumlah PMKS di Kabupaten Serang masih cukup tinggi, sehingga proses penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan PMKS masih terbatas seperti rumah singgah atau shelter rumah aman Kabupaten Serang belum ada.
4. Pengelolaan database PMKS khususnya fakir miskin belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak PMKS khususnya fakir miskin belum mendapatkan program pelayanan social.
5. Belum terkoordinasinya pengentasan kemiskinan antar lembaga di Kabupaten Serang.
6. Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi bagi PMKS khususnya fakir miskin.
7. Kurangnya tenaga profesi pekerja social.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, maka Dinas Sosial mempunyai tugas yang tidak ringan, maka sudah barang tentu di perlukan sinergitas semua pemangku kebijakan, stakeholder dan peran masyarakat dalam menjawab tantangan tersebut. Kemudian peningkatan bagi pembangunan urusan bidang sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, SKPD berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Didalam Renstra juga memuat Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021.

Visi pembangunan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS”

Visi tersebut di atas dijabarkan kedalam 6 (*Enam*) Misi Pembangunan Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Layanan Pendidikan Yang Bermutu disetiap Jalur dan Jenjang Pendidikan serta Melestarikan dan Mengembangkan Tradisi Budaya sebagai Kearifan Lokal yang Tumbuh dan Hidup di Tengah Masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau yang didukung oleh Tenaga Kesehatan yang Profesional.
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Pemukiman yang Memadai dan Berkualitas.

4. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional dengan dilandasi oleh Keadilan dan Kesetaraan Gender.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara.

Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani urusan sosial yang juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maka akan melaksanakan atau mengampu 1 (Satu) Misi, yaitu Misi ke 4 yaitu

“Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan”.

Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan misi ke 4 (*Empat*) diatas tentu dalam hal penanggulangan kemiskinan, dimana Dinas Sosial berperan dan berfungsi sebagai instansi yang lebih focus dalam penanganan kesejahteraan social terutama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan misi Pembangunan Kabupaten Serang yang ke empat diatas , maka tujuan yang akan di capai Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 yaitu:
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan tujuan yang akan di capai Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 diatas, maka yang menjadi sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah:
“Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial”

Untuk mengukur capaian sasaran strategis diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program, maupun Indikator Kinerja Kegiatan beserta targetnya yang dijabarkan dan ditentukan setiap Tahun.

Berikut rekapitulasi mulai dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut target Tahun 2021, sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
beserta Target Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social	<i>Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial</i>	3%

Untuk memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama diatas maka ditetapkan Program Program yang akan dilaksanakan, berikut sasaran dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel 2.2
Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2021 (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	100

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Kondisi yang lebih baik Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100

Untuk memenuhi capaian target kinerja sasaran juga di tetapkan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang, berikut rekapan Kegiatan Kegiatan dan anggaran Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan & Anggaran Tahun 2021

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3,452,282,630

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	6,228,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	390,733,500
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	308,251,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1,124,333,900
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	437,141,280
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	4,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	46,385,880
Jumlah		13,493,080,284

1.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan perjanjian kinerja yang dibuat setiap tahunnya yaitu sebagai:

1. Akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2. Wujud nyata komitmen
3. Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja didasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2021, berikut rekap Program sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rekap Program dan Anggaran
Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang
Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,723,724,094	5 Kegiatan 19 Sub Kegiatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3,452,282,630	1 Kegiatan 5 Sub Kegiatan
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	6,228,000	1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan

4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	698,984,500	2 Kegiatan 10 Sub Kegiatan
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,124,333,900	1 Kegiatan 3 Sub Kegiatan
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	441,141,280	2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	46,385,880	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan
Jumlah		13,493,080,284	13 Kegiatan 42 Sub Kegiatan

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama, Capaian Kinerja Program dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti dan menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Tolok ukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis dapat dilihat dari capaian Indikator Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Serang, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Gambaran Misi yang diampu, Tujuan, Sasaran Strategis
serta Indikator Sasaran (IKU)

Misi 4	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan
Tujuan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial

Adapun analisa dari capaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi Bupati Serang yang ke 4, melalui capaian target indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisa Capaian Sasaran Strategis
Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang
Tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	3%	3,85%	128%	3			3			3			3			3		

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Kinerja Utama)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	3	3.86	128

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur hanya pada APBD Kabupaten Serang saja, hal tersebut untuk memotret kemampuan Pemerintah Kabupaten Serang dalam penanganan/penanggulangan kemiskinan khususnya penanganan atau penurunan jumlah PMKS yang ada di wilayah Kabupaten Serang.

Capaian target Indikator Kinerja Utama dapat terpenuhi melalui 4 Program, sebagaimana dapat terlihat di table di bawah ini:

Tabel 3.4
Program yang mempengaruhi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23	10,77	148,96
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08	0,06	75
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	128,25	128,25

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	100	100	100

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	100	-	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23	10,77	148,96
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08	0,06	75
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	128,25	128,25
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Meningkatnya Kondisi yang lebih baik Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100	100	100

Untuk dapat memenuhi capaian dari berbagai target indikator yang sudah ditentukan dari masing-masing program, hal tersebut didapat dari berbagai kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing masing bidang dan secara teknis akan dilaksanakan oleh para kepala seksi, berikut penjabarannya:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pada bidang ini pemberdayaan sosial memiliki pagu *Rp. 3,452,282,630*, dengan realisasi *Rp. 3,254,631,640* sehingga capaiannya mencapai *94.27 %*. Dalam Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan dan 5 Sub kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 5 Sub kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

- a) Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar *Rp. 42,621,900* dengan realisasi sebesar *Rp. 22,607,900* dan capaiannya *53,04 %*.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di atur yaitu melaksanakan Kegiatan Rapat serta bimbingan teknis pekerja sosial masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan II dibulan april 2021.

- b) Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota

Pagu yang di dapatkan sebesar *Rp.688,244,900* dengan realisasi sebesar *Rp. 644,437,900* dan capaiannya *93,63 %*.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan tahun ini hanya pemberian alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- c) Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota.

Pagu yang di dapatkan sebesar *Rp. 2,127,786,580* dengan realisasi *Rp. 2,092,579,740* dengan Capaiannya *98,35 %*.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu pemberian alat transportasi berupa sepeda motor sebanyak 107 unit kepada pendamping PKH dan JAMSOSRATU dibulan oktober 2021 dan alat komunikasi berupa tablet sebanyak 146 unit kepada Pendamping PKH dibulan Desember 2021.

No	Jenis Barang	Model	Jumlah Barang	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Sepeda Motor	Mio M3 125 CC	107	Pendamping PKH (38 Unit) & JAMSOSRATU (69 Unit)	Oktober 2021
2	Tablet	SPC Tablet L80s	146	Pendamping PKH	Desember 2021

- d) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

Pagu yang di dapatkan sebesar *Rp.572,103,450* dengan realisasi *Rp.480,623,900* sehingga capaiannya sebesar *84,01 %*

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu Rapat Kordinasi, pelatihan dan Pemberian bantuan alat perbengkelan, Sosialisasi SLRT, dan pembinaan LKS yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.

NO	Jenis Kegiatan	Aktivitas	Keterangan
1	Rakor		
2	Pelatihan dan Pemberian alat Perbengkelan		
3	Sosialisasi SLRT		
4	Pembinaan LKS	Pembinaan LKS yang dilaksanakan di Aula Dinas sosial pada Bulan Desember 2021	Jumlah Peserta 30 Orang

- e) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

Pagu yang di dapatkan sebesar Rp.21,525,800 dengan realisasi Rp. 14,382,200 serta capaian 66,81 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu pemberian konseling kepada 105 keluarga, berikut data capaiannya :

No	Aktivitas	Satuan	Bulan												Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Konseling Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	19	3	53	2	3	5			15	5			105

Dokumen Aktivitas



2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pada bidang ini penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan memiliki pagu Rp. 6,228,000, dengan realisasi Rp.0,- sehingga capaiannya 0%,- Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan diantaranya :

1. Pemulungan warga Negara migran korban tindak kekerasan
 - a. Fasilitas Pemulungan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
Anggaran pagu sebesar Rp.6,228,000 dengan realisasi Rp.0,- dengan capaian 0 %,-Hal ini dikarenakan dalam 1 tahun ini tidak ada laporan terkait tindak kekerasan yang harus di pulangkan ke wilayah Kabupaten Serang.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pada program ini Rehabilitasi sosial memiliki pagu Rp. 698,984,500, dengan realisasi Rp. 646,277,500 sehingga capaiannya 92.46 %. Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan dan 10 Sub kegiatan diantaranya :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

1) Penyediaan Permakanan

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 83,410,000 dengan realisasi sebesar Rp. 79,510,500 dan capaiannya 95,32 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu Penerima Bantuan Sosial permakanan bagi anak yatim dan yatim piatu terlantar sebanyak 500 PMKS.

No	Kecamatan	Jumah penerima Bantuan
1	Carenang	17
2	Cikeusal	17
3	Cinangka	17
4	Gunung sari	17
5	Kopo	17
6	Kragilan	17
7	Pabuaran	19
8	Pontang	17
9	Tanara	17
10	Tunjung teja	21
11	Jawiln	17
12	Bojonegara	17
13	Mancak	17

14	Baros	17
15	Kibin	17
16	Anyer	17
17	Padarincang	17
18	Ciruas	17
19	Cikande	17
20	Pamarayan	18
21	Tirtayasa	17
22	Kramatwatu	17
23	Waringinkurung	17
24	Ciomas	17
25	Petir	17
26	Pulo ampel	17
27	Lebak wangi	17
28	Bandung	17
29	Binuang	17
Jumlah		500

2) Penyediaan Sandang

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 87,700,700 dengan realisasi sebesar Rp. 78,250,000 dan capaiannya 89,22 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu Penerima Bantuan Sosial penyediaan sandang bagi anak yatim dan yatim piatu terlantar sebanyak 500 PMKS adapun data penerimanya sesuai dengan data bantuan permakanan.

3) Penyediaan Alat Bantu

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 170,000,000 dengan realisasi sebesar Rp. 169,965,000 dengan capaiannya 99,98 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas, berupa :

NO	Kecamatan	Jumlah Penerima Manfaat			Total
		UEP Warungan	UEP Steam Motor	Kursi Roda	
1	Cikande	3			3
2	Cinangka	5	4		9
3	Pamarayan	3	4		7
4	Ciomas	5			5
5	Lebakwangi	4	3	1	8

6	Pontang	4			4
7	Baros	4		1	5
8	Kramatwatu	3		2	5
9	Waringinkurung	4			4
10	Cikeusal	2			2
11	Ciruas	7			7
12	Gunungsari	6	3		9
13	Tunjungteja			3	3
Jumlah Keseluruhan Penerima Manfaat					71

4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 16,997,800 dengan realisasi sebesar Rp. 14,525,000 dengan capaiannya 85.45 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu memberikan fasilitasi bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada calon penerima bantuan alat bantu. Jumlah Peserta penerima bimbingan sesuai dengan penerima bantuan alat bantu sebanyak 71 PMKS.

5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 27,300,000 dengan realisasi sebesar Rp. 25,300,000 dengan capaiannya 92.67 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu memberikan fasilitasi bimbingan sosial kepada 142 PMKS.

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Bimbingan			Total
		UEP Warungan	UEP Steam Motor	Kursi Roda	
1	Cikande	6			6
2	Cinangka	10	8		18

3	Pamarayan	6	8		14
4	Ciomas	10			10
5	Lebakwangi	8	6	2	16
6	Pontang	8			8
7	Baros	8		2	10
8	Kramatwatu	6		4	10
9	Waringinkurung	8			8
10	Cikeusal	4			4
11	Ciruas	14			14
12	Gunungsari	12	6		18
13	Tunjungteja			6	6
Jumlah Keseluruhan Penerima Bimbingan					142

6) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 5,325,000 dengan realisasi sebesar Rp. 3,800,000 dengan capaiannya 71.36 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu monitoring data yang melakukan pengaduan.

Dokumen Aktivitas



b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial

1) Penyediaan Permakanan

Pagu yang di dapatkan sebesar *Rp. 36,000,000* dengan realisasi sebesar *Rp. 33,000,000* dengan capaiannya *91.67 %*.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu pemberian honorarium petugas RPS sebanyak 2 orang.

No	Nama	Jabatan	Uraian	Jumlah
1	Sutoko	Petugas RPS	12 Bulan x 1.500.000	18.000.000
2	Ikhyal Kirom	Petugas RPS	12 Bulan x 1.500.000	18.000.000

2) Penyediaan Alat Bantu

Pagu yang di dapatkan sebesar *Rp. 105,000,000* dengan realisasi sebesar *Rp. 104,742,000* dengan capaiannya *99.75 %*.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu memberikan bantuan alat batu kepada 30 PMKS. Berikut data yang di capai :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA
1	TIRTAYASA	10 PMKS
2	PAMARAYAN	5 PMKS
3	TANARA	8 PMKS
4	CINANGKA	5 PMKS
5	LEBAK WANGI	2 PMKS
JUMLAH PENERIMA		30 PMKS

3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pagu yang di dapatkan sebesar *Rp. 17,751,000* dengan realisasi sebesar *Rp. 6,355,000* dengan capaiannya *35.80 %*.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu fasilitasi bimbingan fisik,mental dan sosial kepada 30 PMKS. Berikut data yang di capai :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA
1	TIRTAYASA	10 PMKS
2	PAMARAYAN	5 PMKS
3	TANARA	8 PMKS
4	CINANGKA	5 PMKS
5	LEBAK WANGI	2 PMKS
JUMLAH PENERIMA		30 PMKS

4) Pemberian layanan Rujukan

Pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 149,500,000 dengan realisasi sebesar Rp. 130,830,000 dengan capaiannya 87.51 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu pemberian honorarium kepada pegawai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) kepada 3 (Tiga) petugas dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

No	Nama Pegawai	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1	Imam Ahmad Khusyaeri	Petugaas SLRT	12 Bulan x Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
2	Anggi Dwirantau S	Petugaas SLRT	12 Bulan x Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
3	Fitri Rizki	Petugaas SLRT	12 Bulan x Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
Total				Rp. 54.000.000

Dokumen Aktivitas



4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pada bidang ini Perlindungan dan jaminan sosial memiliki pagu Rp. 1,124,333,900, dengan realisasi Rp. 885,361,500 sehingga capaiannya mencapai 78.75 %. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan diantaranya :

1. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 177,257,000 dengan realisasi sebesar Rp. 168,257,000 dan capaiannya 94,92 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu sosialisasi Up-dating perbaikan NIK kelayakan penerima Bansos, dan data PMKS.

b. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 95,726,900 dengan realisasi sebesar Rp. 79,461,800 dan capaiannya 83,01 %.

Adapun aktvitias yang dilakukan yaitu monitoring dan bimbingan terhadap pelaksanaan BPNT.

c. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 851,350,000 dengan realisasi sebesar Rp. 637,642,700 dan capaiannya 74,90 %.

Adapun aktvitias yang dilakukan yaitu

1. Pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 21 kelompok dimana perkelompok terdiri dr 5 orang, berikut rincian kube per Kecamatan:

No	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	BOJONEGARA	15
2	TIRTAYASA	15
3	CIRUAS	15
4	PONTANG	5
5	PULOAMPEL	15
6	BINUANG	15
7	TUNJUNG TEJA	10
8	MANCAK	15
Jumlah		105

2. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 80 Orang, berikut rekap per Kecamatan:

No	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	PADARINCANG	25
2	PONTANG	15
3	KIBIN	20
4	CIRUAS	10
5	BANDUNG	5
6	TIRTAYASA	5
Jumlah		80

Dokumen Aktivitas



5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Pada bidang ini Penanganan Bencana memiliki pagu Rp. 441,141,280, dengan realisasi Rp. 430,684,130 sehingga capaiannya mencapai 97.63 %. Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

a. Sub kegiatan penyediaan permakanan

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 437,141,280 dengan realisasi sebesar Rp. 426,684,130 dan capaiannya 97,61 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu penyediaan Baferstok untuk Korban bencana alam yang teraliasi sebanyak 11.863 Orang dalam 1 Tahun.

2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten.

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Dalam hal ini pagu yang di dapatkan sebesar Rp. 4,000,000 dengan realisasi sebesar Rp. 4,000,000 dan capaiannya 100 %.

Dalam realisasinya aktivitas yang dilakukan yaitu pembayaran sewa Reffiter di triwulan 4 (Empat) yaitu dibulan Desember.

Dokumen Aktivitas



6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pada bidang ini Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki pagu *Rp. 46,385,880*, dengan realisasi *Rp. 38,636,066 sehingga* capaiannya mencapai 83.29%. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota Pagu anggaran sebanyak *RP. 22,385,880* dengan realisasi *Rp17,636,066* dengan capaian 78,78 %.

Adapun realisasi aktivitasnya yaitu pemeliharaan 3 (tiga) tugu perjuangan yang berlokasi di kecamatan Pabuaran, Padarincang dan Anyer, dan bantuan jaminan hidup bagi 1 (satu) orang janda perintis

- b. Sub kegiatan pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota, Pagu anggaran sebesar *Rp. 24.000.000,-* dengan realisasi mencapai *Rp. 21.000.000,-* atau 87,50 %.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjaganya taman makam Ki Syam'un dan SA Tirtayasa.

Dokumen Aktivitas



3.2. Realisasi Anggaran

Data yang disajikan merupakan hasil laporan yang diambil dari data keuangan dinas sosial kabupaten serang,

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Dinas Sosial

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,723,724,094	6,765,454,784	87,59
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,688,000	41,410,000	73,05
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,130,000	35,910,000	77,85
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,499,000	1,159,000	77,32
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,499,000		-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,499,000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,499,000	1,159,000	77,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,487,000	447,000	30,06
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,075,000	2,735,000	88,94
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,156,400,000	5,529,484,040	89,82
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6,156,400,000	5,529,484,040	89,82
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	422,510,311	332,303,825	78,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,465,125	2,100,000	22,19
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	64,201,786	36,227,000	56,43

	Penyediaan bahan logistik kantor	50,100,900	40,965,900	81.77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,888,000	45,917,425	83,66
	Penyediaan Bahan- Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000	7,200,000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,465,500	7,849,500	62,97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,189,000	192,044,000	85,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623,373,783	509,435,919	81.72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316,839,976	283,484,919	89.47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306,533,807	225,951,000	73.71
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464,752,000	352,821,000	75,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	445,452,000	341,056,000	76,56
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	19,300,000	11,765,000	60.96
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3,452,282,630	3,254,631,640	94.27
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3,452,282,630	3,254,631,640	94.27
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42,621,900	22,607,900	53.04
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	688,244,900	644,437,900	93.63
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2,127,786,580	2,092,579,740	98.35

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	572,103,450	480,623,900	84,01
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	21,525,800	14,382,200	66.81
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAN KEKERASAN	6,228,000	-	-
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	6,228,000	-	-
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6,228,000	-	-
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	698,984,500	646,277,500	93,46
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	390,733,500	371,350,500	95,04
	Penyediaan Permakanan	83,410,000	79,510,500	95.32
	Penyediaan Sandang	87,700,700	78,250,000	89.22
	Penyediaan Alat Bantu	170,000,000	169,965,000	99.98
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	16,997,800	14,525,000	85.45

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	27,300,000	25,300,000	92.67
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5,325,000	3,800,000	71.36
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	308,251,000	274,927,000	89,19
	Penyediaan Permakanan	36,000,000	33,000,000	91.67
	Penyediaan Alat Bantu	105,000,000	104,742,000	99.75
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	17,751,000	6,355,000	35.80
	Pemberian layanan Rujukan	149,500,000	130,830,000	87.51
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,124,333,900	885,361,500	78,75
	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1,124,333,900	885,361,500	78,75
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	177,257,000	168,257,000	94.92
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,095,726,900	79,461,800	83,01
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	851,350,000	637,642,700	74,90
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	441,141,280	430,684,130	97,63
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	441,141,280	405,309,130	91.88

	Penyediaan Makanan	437,141,280	426,684,130	91.88
	Kegiatan Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4,000,000	4,000,000	100
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	46,385,880	38,636,066	83,29
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	46,385,880	38,636,066	83,29
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	22,385,880	17,636,066	78,78
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24,000,000	21,000,000	87,50
	Total Belanja	13,493,080,284	12,021,045,620	89.09

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1. Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Serang memperlihatkan pencapaian Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- 4.1.2. Dalam rangka mencapai target indikator kinerja urusan sosial tahun 2021, alokasi anggaran tahun 2021 untuk urusan sosial sebesar Rp. 13,493,080,284,- dengan realisasi mencapai Rp 12,021,045,620,- atau 89.09 % dari rencana anggaran, hal ini hasil efisiensi anggaran.

4.2. Rekomendasi

- 4.2.1. Dalam penyusunan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta target kinerja OPD harus berpedoman pada Rencana Strategis OPD sehingga tercipta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran OPD.
- 4.2.2. Untuk menghindari menurunnya realisasi anggaran maka diharapkan PPTK/KPA dapat lebih awal melaksanakan kegiatannya dan merencanakan anggaran kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan biaya sehingga realisasi tidak terlalu berbeda dengan anggaran yang tersedia
- 4.2.3. Evaluasi dan pelaporan perlu secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi secara internal agar progres report dari pelaksanaan dapat diketahui dan diantisipasi bila mengalami keterlambatan
- 4.2.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan harus dioptimalkan untuk mengetahui progres report dari setiap program/kegiatan sehingga hambatan/kendala yang mungkin dihadapi dapat diantisipasi lebih cepat untuk kemudian merumuskan solusi yang tepat.

LAMPIRAN
SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS SOSIAL

Jl. Raya Serang Petir No. 1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Telp. (0254)200304

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

NOMOR : 050/109 /DINSOS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menunjuk dan menangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

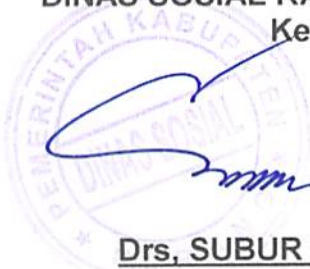

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang ;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG TAHUN 2021;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021, bertugas menghimpun bahan-bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan Laporan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Serang;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 6 Januari 2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG
Kepala,



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang;
2. Yth. Wakil Bupati Serang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
4. Seluruh Anggota Tim
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. SERANG
NOMOR : 050/ 00 /DINSOS/2022
TANGGAL : JANUARI 2022

SUSUNAN TIM
PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua Tim
3	Kasubag Program & Pelaporan Dinas Sosial	Sekretaris
4	Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
5	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
6	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kasubag Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 6 Januari 2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG
Kepala,


Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang;
2. Yth. Wakil Bupati Serang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
4. Seluruh Anggota Tim
5. Arsip